

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN**

Dyka Christine Aipassa

NPP. 32.0776

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: dykacha16@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Meliasta Hapri Tarigan, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The low political awareness among first-time voters in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Balikpapan highlights the urgency of enhancing civic participation to uphold democratic quality. Despite their strategic potential, first-time voters are often unfamiliar with political rights and procedures. The National and Political Unity Agency (Kesbangpol) plays a key role in fostering this awareness, yet faces challenges such as limited outreach, resource constraints, and lack of adaptive digital strategies. **Purpose:** This study aims to analyze the role of Kesbangpol Balikpapan in increasing political participation among first-time voters during the 2024 Pilkada, explore inhibiting and supporting factors, and recommend strategies to improve its effectiveness. **Method:** A qualitative descriptive method was used, with data collected through semi-structured interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using reduction, categorization, and interpretation based on the role theory by Biddle & Thomas. **Result:** The findings indicate that Kesbangpol has implemented political education through school visits, seminars, and social media campaigns targeting youth. However, these efforts are limited by inadequate collaboration with schools, lack of systematic evaluation, and underutilization of digital platforms. **Conclusion:** Kesbangpol must adapt to the digital communication habits of Generation Z, enhance interagency coordination (e.g., with KPU and Bawaslu), and develop measurable and interactive civic education programs to increase the political engagement of first-time voters in future elections.

Keywords: First-time Voters, Political Participation, Kesbangpol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kota Balikpapan menunjukkan urgensi peningkatan partisipasi politik untuk menjaga kualitas demokrasi. Meskipun memiliki potensi strategis, pemilih pemula kerap tidak memahami hak dan prosedur politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran ini, namun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan jangkauan, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya strategi digital adaptif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kesbangpol Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi politik

pemilih pemula pada Pilkada 2024, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi, mengkategorikan, dan menyimpulkan data berdasarkan teori peran dari Biddle & Thomas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol telah melaksanakan pendidikan politik melalui kunjungan ke sekolah, seminar, dan kampanye media sosial yang menysasar generasi muda. Namun, upaya tersebut masih terbatas karena kurangnya kolaborasi dengan sekolah, tidak adanya sistem evaluasi yang terukur, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. **Kesimpulan:** Kesbangpol perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan karakteristik digital Generasi Z, memperkuat koordinasi lintas sektor (misalnya dengan KPU dan Bawaslu), serta mengembangkan program pendidikan politik yang interaktif dan dapat diukur untuk meningkatkan keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu mendatang. **Kata Kunci:** Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, Bakesbangpol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momentum strategis dalam demokrasi lokal yang rentan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dalam konteks Kota Balikpapan yang memiliki dinamika sosial-politik yang dinamis dan didominasi oleh generasi muda, peran Ormas dalam membentuk opini publik serta mengarahkan preferensi politik masyarakat tidak dapat diabaikan. Ormas sering kali menjadi kanal mobilisasi pemilih, terutama di kalangan pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman politik yang matang.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Rahman, 2016) “Pemilih pemula sering kali menjadi sasaran utama kampanye politik dan berisiko hanya dimobilisasi, bukan diberikan pendidikan politik yang sehat dan objektif.” Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga partisipatif dan literatif terhadap realitas sosial. Di sisi lain, (Djumadin, 2021) menyebut bahwa “partisipasi politik mahasiswa sebagai bagian dari pemilih pemula dapat mendorong kemandirian berpolitik dan ketahanan terhadap provokasi”, namun hal tersebut hanya bisa terjadi jika pendidikan politik berlangsung secara inklusif dan tidak elitis. Data dari Bakesbangpol Kota Balikpapan menunjukkan bahwa jumlah Ormas yang aktif dan terdaftar pada tahun 2023 mencapai lebih dari 200 entitas. Namun, belum seluruhnya terpantau aktivitasnya secara berkala. Dalam konteks ini, Bakesbangpol diharapkan menjadi institusi yang mampu menjembatani kepentingan negara dan masyarakat sipil. Penelitian oleh (Wangsih et al., 2024) menyatakan bahwa “fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai maupun lembaga negara seringkali belum menyentuh aspek moral dan rasionalitas dalam berpolitik, sehingga berpotensi menciptakan masyarakat yang apatis atau pragmatis.”

Selain itu, penelitian oleh (Huljana & Baharudin, 2022) yang dilakukan di Aceh Barat juga menyoroti bahwa strategi yang digunakan oleh Bakesbangpol dalam menysasar pemilih pemula masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan tidak meratanya sarana informasi digital, terutama di wilayah pinggiran. Padahal, menurut (Riyanti & Danang Prasetyo, 2023), pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan modal dasar dalam membentuk orientasi politik generasi muda agar mampu menjalankan hak pilih secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai demokratis. Tingginya potensi pemilih muda yang belum tersentuh edukasi politik secara memadai dapat menciptakan ruang abu-abu yang rawan diisi oleh hoaks politik, ujaran kebencian, serta

polarisasi. (Weiyu Zhang et al., 2011) bahkan menekankan bahwa di Asia, keterlibatan generasi muda dalam politik hanya dapat meningkat jika negara dan institusinya mampu membangun saluran partisipasi yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka.

Dalam konteks ini, (Uluputty, 2015) menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas utama institusi seperti Kesbangpol—tidak hanya menyangkut fungsi administratif, tetapi juga meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan kerukunan sosial, hingga fasilitasi kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Peran Kesbangpol sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum sangat krusial dalam menciptakan ruang partisipasi politik yang stabil dan inklusif, terutama di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis perencanaan pembangunan yang berbasis SWOT terhadap fungsi Kesbangpol menjadi instrumen penting dalam membangun strategi komunikasi dan pendidikan politik yang terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi pemerintah daerah, khususnya Bakesbangpol, untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga hadir sebagai fasilitator komunikasi politik antara pemilih pemula dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Peran ini akan semakin penting dalam menciptakan ruang demokrasi lokal yang inklusif dan mencegah meningkatnya angka golput di kalangan generasi muda. “Kesbangpol harus menjadi katalisator dalam membentuk partisipasi yang cerdas, rasional, dan tidak represif,” tegas (Indah et al., 2024) dalam kajiannya mengenai sistem pendidikan politik berbasis nilai.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penguatan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada merupakan isu strategis dalam pembangunan demokrasi lokal. Kota Balikpapan memiliki jumlah pemilih pemula yang tergolong tinggi, sehingga penting untuk memastikan peran aktif lembaga pemerintah dalam mendorong keterlibatan politik kelompok ini. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi aktor penting dalam memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi dan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah.

Namun demikian, pengawasan dan pembinaan terhadap pemilih pemula masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk literasi politik pemilih pemula secara umum (Riyanti & Danang Prasetyo, 2023) tetapi belum secara spesifik mengkaji peran teknis Kesbangpol sebagai fasilitator utama dalam meningkatkan partisipasi politik pemula di tingkat lokal. Padahal, Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjangkau pemilih pemula secara langsung melalui pendekatan berbasis kelembagaan dan kerja sama lintas sektor.

Selain itu, penelitian terdahulu mengenai partisipasi politik mahasiswa lebih menyoroti peran individu dalam merespons isu politik (Djumadin, 2021), tetapi belum menyentuh aspek koordinatif antara lembaga pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan dalam mendidik pemilih pemula. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai peran Kesbangpol sebagai aktor institusional dalam menyusun strategi adaptif dan edukatif yang mampu meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan pendekatan berbasis karakteristik generasi muda saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran Badan Kesbangpol Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan strategi pembinaan politik yang lebih relevan dan responsif terhadap dinamika generasi muda serta tantangan demokrasi lokal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Zhang et al, 2011) dalam laporan berjudul *Youth, ICTs and Political Engagement in Asia* menyatakan bahwa keterlibatan politik generasi muda di Asia masih rendah karena pendekatan komunikasi politik yang digunakan belum sesuai dengan karakteristik digital generasi muda. Temuan ini memperkuat urgensi penggunaan media digital oleh lembaga seperti Kesbangpol dalam menyampaikan pendidikan politik yang efektif kepada pemilih pemula.

Sementara itu, (Kitanova, 2020) dalam penelitiannya *Youth Political Participation in the EU* menunjukkan bahwa partisipasi politik formal pemuda di Eropa, termasuk pemilu, masih tergolong rendah meskipun mereka aktif dalam bentuk partisipasi non-formal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan demokratis untuk meningkatkan keterlibatan politik pemuda secara institusional.

(Holbein et al., 2022) melalui artikelnya *Promoting Voter Turnout* menjelaskan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi pemilu tidak cukup melalui kampanye satu arah, tetapi harus melalui pendekatan berbasis nilai, interaksi, dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemuda.

Penelitian oleh (Riyanti & Danang Prasetyo, 2023) dalam artikelnya *Political Education of New Voters through Civic Education in Indonesia* menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dalam membentuk pemilih pemula yang sadar politik dan bertanggung jawab. Mereka merekomendasikan integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan literasi demokrasi generasi muda.

(Rusfiana & Kurniasih, 2024) dalam jurnalnya *The Role of Civil Society Organizations in Political Education* menekankan bahwa Ormas memiliki peran penting dalam pendidikan politik, namun bila tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah, bisa menjadi saluran politisasi yang bias. Oleh karena itu, peran Bakesbangpol sebagai institusi pengawas menjadi krusial dalam menjaga netralitas dan stabilitas sosial.

(Dema & R, 2024) dalam artikel *Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Millennial* menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih muda sangat dipengaruhi oleh pendekatan digital. Namun, pemerintah daerah masih belum optimal memanfaatkan media sosial sebagai alat pendidikan politik, termasuk Bakesbangpol.

Penelitian (Djumadin, 2021) dalam *Student Political Participation and the Future of Democracy in Indonesia* menemukan bahwa mahasiswa sebagai pemilih pemula cenderung memiliki partisipasi politik yang rendah karena minimnya literasi politik dan kepercayaan terhadap proses politik.

(Rahman, 2016) dalam artikelnya *Pengaruh Civic Literacy terhadap Partisipasi Politik Siswa SMA* menunjukkan bahwa tingkat civic literacy siswa secara signifikan memengaruhi kesiapan mereka dalam berpartisipasi di pemilu. Pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai media strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada pemilih pemula.

(Huljana & Baharudin, 2022) dalam jurnalnya *Strategi Badan Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Aceh Barat* menjelaskan bahwa Kesbangpol telah berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui sosialisasi dan forum diskusi, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan sarana digital.

(Wibowo & Harefa, 2015) dalam tulisannya *Urgensi Pengawasan Ormas oleh Pemerintah* menyatakan bahwa pengawasan Ormas harus dilakukan secara terstruktur dan tidak represif. Mereka menegaskan pentingnya regulasi jelas agar Ormas tidak bertindak di luar batas hukum dan demokrasi.

(Arsyi & Rahmad, 2022) dalam penelitiannya berjudul *Strategi Kesbangpol Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula* menemukan bahwa program sosialisasi politik yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula, meskipun pelaksanaannya sempat terkendala pengalihan anggaran akibat pandemi. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan strategi Kesbangpol di daerah lain dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda

(Citrayanti & Yuhertiana, 2021) dalam artikel Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Memilih pada Pemilih Muda dalam Pilkada 2020 menemukan bahwa media sosial dan tokoh panutan sangat memengaruhi keputusan politik pemilih muda, terutama mereka yang baru pertama kali mengikuti pemilu.

(Iqrima & Amrazi Zakso, 2019) melalui penelitiannya Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Pendidikan menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula, terutama dalam pemahaman tentang hak suara dan prosedur pemilu.

(Ardiani et al., 2019) dalam tulisannya Strategi Sosialisasi Politik oleh KPU menilai bahwa strategi edukasi politik oleh KPU kepada pemilih pemula belum menyentuh aspek substansial, karena masih bersifat formal dan satu arah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menunjukkan kebaruan ilmiah baik dari sisi lokasi, fokus, maupun pendekatan teoritis yang digunakan. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pendidikan politik pemilih pemula secara umum, seperti yang dilakukan oleh (Riyanti & Danang Prasetyo, 2023) yang menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk orientasi politik pemilih pemula. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya berfokus pada pendidikan politik di sekolah, tetapi menyoroti peran langsung lembaga pemerintah daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dalam mengintervensi tingkat partisipasi pemilih pemula menjelang Pilkada 2024.

Selain itu, (Djumadin, 2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa rendahnya partisipasi mahasiswa disebabkan oleh rendahnya literasi politik dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji strategi konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini hadir dengan membedah strategi, sinergi kelembagaan, hingga penggunaan media sosial sebagai medium edukatif Kesbangpol, yang belum ditelusuri oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh (Huljana & Baharudin, 2022) memang telah menyoroti strategi Kesbangpol di Aceh Barat, namun belum menyentuh pengaruh langsung terhadap pemilih pemula dan partisipasi politik dalam konteks Pilkada. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran Kesbangpol Kota Balikpapan secara khusus dalam menumbuhkan partisipasi politik generasi muda yang berjumlah lebih dari 130.000 orang.

Dari sisi pendekatan teori, penelitian ini menggunakan teori peran (Biddle & Thomas, 2007) yang belum digunakan secara eksplisit dalam kajian Kesbangpol dan pemilih pemula. Dimensi teori ini—meliputi harapan, norma, perilaku, dan evaluasi—digunakan untuk menilai efektivitas fungsi Kesbangpol sebagai lembaga penggerak partisipasi demokratis. Ini berbeda dengan pendekatan deskriptif pada penelitian (Rusfiana & Kurniasih, 2024), yang menyoroti Ormas tanpa memeriksa sinergi langsung antara lembaga dan pemilih pemula.

Selain itu, penelitian ini juga menjawab tantangan yang disebut dalam laporan (Zhang et al., 2011) bahwa komunikasi politik untuk generasi muda di Asia belum mampu menyesuaikan diri dengan pola digital anak muda. Penelitian ini memperkenalkan strategi komunikasi digital yang mulai diadopsi Kesbangpol sebagai respons terhadap karakteristik Generasi Z.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus lokal dan kontekstual (Kota Balikpapan, Pilkada 2024), penggunaan teori peran yang belum umum digunakan, penggabungan pendekatan edukatif, koordinatif, dan digital oleh Kesbangpol, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi politik generasi muda secara terukur.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi, program, serta bentuk sosialisasi yang dijalankan oleh Kesbangpol dalam menjangkau generasi muda, khususnya pemilih pemula yang memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam menerima informasi politik. Selain itu, penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang dihadapi Kesbangpol dalam menjalankan fungsinya, serta mengevaluasi efektivitas peran lembaga tersebut dalam membangun kesadaran dan literasi politik di kalangan pemilih pemula. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh serta rekomendasi konstruktif bagi penguatan kebijakan politik daerah yang partisipatif, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan generasi muda dalam konteks demokrasi lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara utuh melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan serta menganalisis data secara kontekstual dan tematik (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada delapan orang informan yang terdiri dari unsur pemerintah (Kepala Kesbangpol, staf bidang politik), pemilih pemula dari kalangan pelajar SMA/ sederajat, perwakilan KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan, serta guru PPKn sebagai pendamping pendidikan politik di sekolah.

Analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles, Matthew.B; Huberman, 2002), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengungkap bentuk-bentuk peran Kesbangpol berdasarkan indikator teori peran dari Biddle & Thomas, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi, dan sanksi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, guna memastikan bahwa informasi yang dihimpun bersifat sah dan representatif terhadap konteks yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Fokus utama penelitian adalah

menggambarkan bentuk peran, strategi, serta efektivitas pendekatan yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta diinterpretasikan menggunakan teori peran dari Biddle & Thomas. Teori ini mencakup lima indikator peran yang menjadi acuan dalam pembahasan, yaitu: harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Kelima indikator ini digunakan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana peran Kesbangpol dijalankan dalam konteks pendidikan politik dan partisipasi pemilih pemula.

Pembahasan hasil penelitian disusun berdasarkan masing-masing dimensi teori peran, guna memberikan gambaran utuh mengenai keterlibatan Kesbangpol sebagai aktor pemerintah dalam mendukung proses demokrasi lokal. Berikut adalah penjabaran dari setiap indikator teori yang telah dianalisis dari temuan lapangan.

3.1. Harapan

Kesbangpol Kota Balikpapan memiliki harapan besar untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan partisipatif, terutama dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula menjelang Pilkada 2024. Harapan tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan sosialisasi politik yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai segmen pemilih pemula terbanyak di kota ini. Bentuk implementasi dari harapan tersebut antara lain melalui kegiatan seminar wawasan kebangsaan, dialog kebangsaan di sekolah menengah, hingga penyebaran konten edukatif melalui media sosial. Melalui wawancara dengan Kepala Kesbangpol, diketahui bahwa harapan utama lembaga ini adalah terwujudnya pemilih pemula yang cerdas, sadar politik, dan aktif menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Sutadi yang menyatakan pentingnya pendidikan politik dimulai sejak dini agar masyarakat, termasuk pemilih pemula, memahami bahwa partisipasi mereka sangat menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Selain dari pihak lembaga, harapan juga datang dari sektor pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yut, guru PPKn di SMAN 1 Balikpapan, yang menekankan perlunya sosialisasi politik terstruktur untuk siswa usia 17 tahun ke atas. Harapannya adalah agar peserta didik tidak hanya mengikuti pemilu secara formal, tetapi juga memahami makna demokrasi serta pentingnya suara mereka dalam sistem pemerintahan. Dari pihak penyelenggara, anggota KPU Kota Balikpapan, Ibu Farida, juga menyampaikan harapan agar pemilih pemula tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami konsekuensi dari pilihan politik mereka. Ia menekankan bahwa pendidikan politik adalah tanggung jawab bersama antara KPU, Kesbangpol, dan partai politik. Kesbangpol sendiri berupaya menjawab harapan ini melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat dan sekolah-sekolah.

Lebih jauh lagi, penggunaan platform digital seperti *Instagram* mencerminkan harapan agar strategi sosialisasi mengikuti perkembangan zaman. Media sosial dianggap efektif menjangkau pemilih pemula karena sesuai dengan kebiasaan informasi mereka sehari-hari. Informasi mengenai pasangan calon, visi-misi, dan jadwal pemilu disebarkan secara visual dan interaktif guna membangun kedekatan emosional dan logis antara pemilih muda dan proses politik. Dengan demikian, dimensi harapan ini mencerminkan ekspektasi kolektif dari berbagai pihak terhadap peran Kesbangpol dalam membentuk generasi muda yang berwawasan kebangsaan, aktif secara politik, dan turut menjaga stabilitas demokrasi lokal di Kota Balikpapan.

3.2. Norma

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Balikpapan, dimensi norma menjadi landasan penting dalam menentukan arah dan bentuk perilaku institusi, termasuk Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Norma dalam konteks ini mengacu pada seperangkat aturan hukum dan etika yang mengikat seluruh proses pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 yang secara spesifik mengatur tugas pokok dan fungsi Kesbangpol dalam pelaksanaan pemilu. Peraturan-peraturan ini menjadi acuan hukum dalam menjalankan kegiatan pendidikan politik, menjaga netralitas ASN, serta mendorong partisipasi masyarakat secara legal dan tertib.

Kesbangpol Balikpapan dalam hal ini memiliki tugas pokok untuk membantu walikota dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik. Fungsi-fungsi spesifiknya mencakup: perumusan kebijakan teknis, pembinaan ideologi Pancasila, penyelenggaraan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan sosial-budaya, serta pemberdayaan ormas dan deteksi konflik sosial. Dalam konteks pemilu, fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan strategis seperti sosialisasi politik, fasilitasi forum koordinasi, hingga evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tugas ini dijalankan secara terstruktur oleh pejabat struktural dalam organisasi Kesbangpol, dari kepala bidang hingga kasubbid yang membawahi program-program teknis di lapangan.

Dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk Sekretaris Kesbangpol Kota Balikpapan, ditegaskan bahwa pelaksanaan pemilu telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Informan menyatakan bahwa “negara kita negara hukum, jadi semua kegiatan Pilkada harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan teknis,” serta bahwa “efektivitas pelaksanaan pemilu sangat bergantung pada kesesuaian regulasi dan kesadaran masyarakat”. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa Kesbangpol tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi melalui pelaksanaan norma yang adil, jujur, dan transparan, sesuai ekspektasi masyarakat dan tuntutan regulasi formal.

3.3. Wujud Perilaku

Wujud perilaku Kesbangpol Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula terlihat dari berbagai langkah konkret yang telah dijalankan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan secara langsung ke 16 sekolah menengah (SMA, SMK, dan MA) di Kota Balikpapan, berlangsung dari 27 Agustus hingga 12 September 2024. Dalam kegiatan ini, Kesbangpol bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk membekali pelajar dengan pemahaman dasar tentang hak pilih, prosedur pemilihan, hingga pentingnya menentukan pilihan politik secara rasional. Selain itu, Kesbangpol juga mengadakan edukasi politik melalui forum dialog kebangsaan dan pelatihan kepemimpinan pelajar sebagai strategi membangun literasi politik secara sistematis.

Upaya ini diperkuat dengan penggunaan media sosial dan platform digital, seperti *YouTube* dan *Instagram @kesbangpol.balikpapan*, untuk menyebarluaskan informasi mengenai Pilkada, profil pasangan calon, informasi lokasi TPS, serta ajakan partisipatif kepada generasi muda. Pemanfaatan media digital menjadi bagian penting karena mayoritas pemilih pemula aktif di dunia maya, sehingga pendekatan berbasis konten visual dan interaktif dianggap lebih efektif dalam menjangkau mereka. Dalam wawancara, Bapak Rudy dari Kesbangpol juga menyampaikan bahwa lembaganya melibatkan berbagai elemen seperti TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan RT/RW dalam menyosialisasikan pentingnya hak suara.

Selain itu, Kesbangpol juga menunjukkan wujud perilaku kolaboratif dengan menjalin sinergi bersama KPU, partai politik, dan sekolah untuk mendorong keterlibatan pemilih pemula dalam proses demokrasi. Menurut Ibu Farida dari KPU, partisipasi bukan hanya soal datang ke TPS, tetapi juga tentang kesadaran dan pemahaman politik yang menyeluruh. Oleh karena itu,

pelibatan lintas sektor menjadi bagian dari strategi perilaku aktif Kesbangpol untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Balikpapan. Melalui berbagai tindakan nyata ini, Kesbangpol tidak hanya memenuhi peran administratif, tetapi juga tampil sebagai aktor kunci dalam pembentukan warga negara muda yang sadar politik, bertanggung jawab, dan partisipatif.

3.4. Penilaian Dan Sanksi

Penilaian terhadap peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula mendapat respons positif dari berbagai pihak, khususnya kalangan pelajar, guru, dan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, para pemilih pemula menilai bahwa kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan Kesbangpol sangat penting karena memberi pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Ibu Yut, seorang guru PPKn dari SMAN 1 Balikpapan, menyatakan bahwa sosialisasi tersebut sangat diperlukan karena peserta didik baru pertama kali akan mengikuti pemilu dan sangat membutuhkan pemahaman yang jelas serta relevan. Hal ini menunjukkan adanya penilaian positif yang diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam Pilkada 2024.

Dari sisi ketertarikan terhadap program sosialisasi, para pemilih pemula terlihat antusias mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol, terutama karena pendekatan yang digunakan cukup variatif dan interaktif. Kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung ke sekolah, penyuluhan digital lewat *Instagram* dan *YouTube*, serta penyebaran video animasi dan poster layanan masyarakat di fasilitas umum seperti bandara dan pusat perbelanjaan [OBJ]. Menurut Bapak Rudy, Kabid Politik Kesbangpol Kota Balikpapan, strategi ini dilakukan agar informasi tidak hanya sampai tetapi juga diterima dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Pendekatan ini dinilai sebagai bentuk inovatif dalam memperluas jangkauan pendidikan politik berbasis teknologi yang relevan dengan karakteristik generasi Z.

Dari aspek sanksi, Kesbangpol tidak secara langsung menjatuhkan hukuman, tetapi memiliki peran dalam merekomendasikan tindakan administratif atau pelaporan kepada instansi berwenang seperti KPU, Bawaslu, atau Kementerian Dalam Negeri jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu, terutama terkait pelibatan organisasi masyarakat yang tidak netral. Fungsi ini menjadi bentuk pengawasan sosial dan politik agar semua pihak yang terlibat, termasuk Ormas dan partai politik, tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Kesbangpol juga memberikan penguatan dalam bentuk evaluasi internal, terutama dalam pelaksanaan program-program pendidikan politik, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar berdampak dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kota Balikpapan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan memegang peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula menjelang Pilkada 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi politik langsung ke sekolah, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi digital, serta pelibatan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, guru PPKn, dan organisasi kepemudaan. Temuan ini menguatkan argumen (Biddle & Thomas, 2007) bahwa peran institusi tidak hanya diukur dari keberadaannya, tetapi dari sejauh mana harapan, norma, perilaku, penilaian, dan sanksi dapat diterapkan secara fungsional dan kontekstual.

Temuan ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Bapak Sutadi, yang menekankan pentingnya mempersiapkan pendidikan politik sejak lima tahun sebelum Pilkada: “Jadi kita melakukan strategi-strategi bagaimana caranya kita melakukan

pembelajaran pendidikan politik bagi masyarakat sejak sekarang.” Harapan ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari guru seperti Ibu Yut dari SMAN 1 Balikpapan yang mengatakan, “Saya rasa untuk tahapan sosialisasi itu perlu sekali, penting sekali, karena di situ kita akan belajar banyak, lebih tahu, lebih detail pemilu itu dan apa dampaknya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa program Kesbangpol mendapat dukungan dari sektor pendidikan dalam mendidik pemilih pemula yang sadar politik.

Temuan ini juga memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti (Rusfiana & Kurniasih, 2024) yang menekankan peran penting organisasi masyarakat dalam pendidikan politik namun belum secara spesifik menyoroti strategi pemerintah daerah terhadap pemilih pemula. Begitu pula dengan temuan (Wangsih et al., 2024) yang menyoroti pentingnya komunikasi digital bagi generasi muda, tetapi belum mengaitkannya dengan aktor pemerintah formal. Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena tidak hanya menjelaskan aspek administratif dan legalitas peran Kesbangpol, tetapi juga memetakan strategi edukatif dan preventif melalui pendekatan multidimensional yang sesuai dengan konteks sosial-politik Balikpapan yang dinamis. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa teori peran dapat diterapkan secara komprehensif untuk menilai efektivitas lembaga dalam mendukung demokrasi lokal secara substantif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi pendidikan politik, baik secara langsung melalui kunjungan ke sekolah-sekolah, forum dialog kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan pelajar, maupun secara digital melalui media sosial dan konten edukatif yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Kesbangpol juga membangun kolaborasi lintas sektor bersama KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat, dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kesadaran politik sejak usia dini.

Melalui pendekatan teori peran Biddle & Thomas, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi harapan terhadap Kesbangpol berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah, guru, dan masyarakat yang menginginkan peningkatan partisipasi politik generasi muda. Dimensi norma tercermin dari aturan yang jelas dan fungsional tentang tugas dan peran Kesbangpol dalam pendidikan politik dan pengawasan demokrasi. Dimensi wujud perilaku terlihat dari pelaksanaan program-program strategis secara aktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, dimensi penilaian menunjukkan adanya apresiasi positif dari pemilih pemula terhadap kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan, dan dimensi sanksi direpresentasikan melalui peran Kesbangpol dalam merekomendasikan tindakan administratif terhadap pelanggaran serta evaluasi internal untuk menjaga efektivitas program.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan solutif dalam merespons tantangan rendahnya partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas institusi daerah dalam membentuk generasi muda yang sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari proses demokratis yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup wilayah, pendekatan metodologis, serta pengukuran hasil. Fokus penelitian terbatas pada satu wilayah administratif, yaitu Kota Balikpapan, tanpa melakukan perbandingan atau generalisasi

ke daerah lain. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif sehingga belum mampu mengukur secara langsung peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dalam bentuk persentase atau data kuantitatif. Keterbatasan juga terdapat pada waktu dan sumber daya, sehingga belum dapat mencakup seluruh sekolah atau pemilih pemula di luar responden yang diwawancarai secara purposif. Beberapa informan kunci seperti partai politik dan ormas keagamaan yang terlibat dalam kampanye juga belum seluruhnya dapat dijangkau secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas secara geografis dan melibatkan perbandingan antar daerah. Penelitian berikut juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mix-method untuk mengukur tingkat efektivitas peran Kesbangpol secara statistik terhadap peningkatan partisipasi politik pemilih pemula. Selain itu, integrasi dengan sistem data digital, pelacakan interaksi media sosial, dan keterlibatan langsung organisasi kepemudaan berbasis komunitas juga diharapkan dapat memperkaya gambaran tentang pola pendidikan politik generasi muda di berbagai konteks politik lokal yang dinamis. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji sejauh mana sinergi antar lembaga seperti Kesbangpol, KPU, Bawaslu, sekolah, dan partai politik berkontribusi dalam membentuk pemilih pemula yang aktif, kritis, dan sadar demokrasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, khususnya kepada para informan yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta mendukung selama proses pengumpulan data. Penulis juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bentuk dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, D., Sri Kartini, D., & Ganjar Herdiansyah, A. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Arsyi, A., & Rahmad, R. (2022). Strategi Kesbangpol Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(2022), 146–150. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i3.56>
- Biddle, & Thomas. (2007). *Role Theory : Concept and Research*. Wiley.
- Citrayanti, S. A., & Yuhertiana, I. (2021). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MEMILIH PADA PEMILIH MUDA DALAM PILKADA TAHUN 2020 (Studi Kasus Pemilih Muda Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2017). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 143–158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1840>
- Dema, H., & R, M. R. R. (2024). Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Millennial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 690–703.
- Djumadin, Z. (2021). Student Political Participation and the Future of Democracy in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2399–2408.

- <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1438>
- Holbein, J. B., Bradshaw, C. P., Munis, B. K., Rabinowitz, J., & Ialongo, N. S. (2022). Promoting Voter Turnout: an Unanticipated Impact of Early-Childhood Preventive Interventions. *Prevention Science*, 23(2), 192–203. <https://doi.org/10.1007/s11121-021-01275-y>
- Huljana, Y. M., & Baharudin, I. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.1-12>
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. 7(September). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/253>
- Iqrima, N., & Amrazi Zakso, S. (2019). Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur. *Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE)*, 2(2), 256–261. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/ICOTE.V2I2.38238>
- Irfan Uluputty. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 37–57. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/489>
- Kitanova, M. (2020). Youth political participation in the EU: evidence from a cross-national analysis. *Journal of Youth Studies*, 23(7), 819–836. <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636951>
- Miles, Matthew.B; Huberman, A. M. (2002). The Qualitative Researcher ' s Companion Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*.
- Rahman, I. N. (2016). PENGARUH CIVIC LITERACY DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK SISWA (Studi Deskriptif Analitis Terhadap Siswa SMA Kota Bandung). *Untirta Civic Education Journal*, 1(1), 68–94.
- Riyanti, D., & Danang Prasetyo. (2023). Political Education of New Voters trough Civic Education in Indonesia. *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA*, 1(1), 20–28. <https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/index>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–206. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Wangsih, R. Nina Karina, A. R. (2024). PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PADA PEMILU YANG CERDAS, OBJEKTIF, DAN BERMORAL DI KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(2), 219–236. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i2.4845>
- Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 07(01), 01–19. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19>
- Zhang, W., Yin, J. L. B., Ullah, S., David, C., & Ilavarasan, P. V. (2011). YOUTH, ICTs AND POLITICAL ENGAGEMENT IN ASIA. *International Communication Gazette*, 75(3), 1–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1748048512472852>